



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UU. ABD. HARIS**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **20595**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.950.000.000**

1. Tanah Seluas 280 m2 di CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. Tanah Seluas 186 m2 di CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/122 m2 di CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 870.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/45 m2 di TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/100 m2 di KOTA CIREBON , HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 206.900.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 94.900.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 19.000.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 2.270.800.000****III. HUTANG****Rp. 73.266.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.197.534.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.